

Quo Vadis Permensos Nomor 29 Tahun 2012 Bagi Anggota Tagana Kota Yogyakarta : Antara Kemanusiaan dan Kesejahteraan

Natalia¹, Yogawati^{2*}, Fany Setyawan³, Adji Suradji Muhammad⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta
yogawati16@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 253-257

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1384>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1384>

Article History:

Received: 22-06-2024

Revised: 28-06-2024

Accepted: 29-06-2024

Abstract : This article focuses on the humanity and welfare of members of the Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Yogyakarta in implementing Permensos Number 29 of 2012 concerning TAGANA. The task of TAGANA is to assist the government in carrying out disaster management during pre-disaster, emergency response and post-disaster. Funding for TAGANA activities in the district / city comes from the APBD according to the ability of each region. It becomes ironic, when the humanitarian spirit must deal with the welfare side. TAGANA as a volunteer is required to be on standby if needed at any time, while also having to continue to earn a daily income. This research uses descriptive qualitative methods. Data were collected through literature study, observation, interviews, and documentation. Informants consisted of 1 active chairman, 2 demised chairmen, 4 members of Tagana and 1 employee of the Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. The results showed that the humanity of TAGANA members in Yogyakarta City can be relied upon through TAGANA's role in several activities such as assessment of disaster events, establishment of field public kitchens, and Tagana Masuk Sekolah. Regarding welfare, the allowance from the Kemensos and operational money from the Social Service have no effect. They are faced with the choice to continue working as usual if at the same time there is a TAGANA activity. TAGANA Kota Yogyakarta activities are still running because of their humanitarian side, especially the backup of members whose time is flexible in carrying out TAGANA assignments until now.

Keywords : Tagana; Volunteer; Disaster; Humanity; Welfare

Abstrak : Artikel ini berfokus pada kemanusiaan dan kesejahteraan anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Yogyakarta dalam menjalankan Permensos Nomor 29 Tahun 2012 tentang TAGANA. Adapun tugas TAGANA adalah membantu pemerintah melaksanakan penanggulangan bencana pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Pendanaan kegiatan TAGANA di kabupaten/kota bersumber dari APBD sesuai kemampuan daerah masing-masing. Menjadi ironi, ketika semangat kemanusiaan harus berhadapan dengan sisi kesejahteraan. TAGANA sebagai sukarelawan dituntut siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, sementara juga harus tetap mencari penghasilan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data dengan studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 1 orang Ketua aktif, 2 orang Ketua demisioner, 4 orang Anggota Tagana Kota Yogyakarta dan 1 pegawai Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan kemanusiaan anggota TAGANA Kota Yogyakarta dapat diandalkan melalui peran TAGANA dalam beberapa kegiatan seperti assessment kejadian bencana, pendirian dapur umum lapangan, dan Tagana Masuk Sekolah. Terkait kesejahteraan, tali asih dari Kemensos dan uang operasional dari Dinas Sosial tidak berpengaruh. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk tetap bekerja seperti biasa jika di saat yang bersamaan ada giat TAGANA. Kegiatan TAGANA Kota Yogyakarta masih berjalan karena sisi kemanusiaan yang dimiliki, terlebih adanya backup dari anggota yang waktunya fleksibel dalam melaksanakan ketugasan TAGANA hingga sampai saat ini.

Kata Kunci : Tagana; Sukarelawan; Bencana; Kemanusiaan; Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Perlu diketahui bersama, yang dimaksud Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah sukarelawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Payung kebijakan yang mengatur TAGANA adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, di mana dalam praktiknya memiliki beberapa tantangan yang dihadapi baik dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan dari TAGANA sendiri sebagai obyek kebijakan. TAGANA sebagai wadah bentukan Kementerian Sosial (KEMENSOS) dalam bidang penanggulangan bencana, menjadi mitra Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah TAGANA Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TAGANA Kota Yogyakarta seperti halnya TAGANA di daerah lain, menjalankan roda organisasi dengan dukungan anggaran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan juga dari Kemensos. Dukungan anggaran diberikan untuk kegiatan-kegiatan TAGANA baik untuk kegiatan prabencana, saat terjadi bencana dan juga pascabencana. Pada masa prabencana, TAGANA biasa melaksanakan Tagana Masuk Sekolah (TMS) ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi materi pengurangan risiko bencana. Pada saat terjadi bencana, mereka mendirikan dapur umum lapangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan para pengungsi/korban bencana. Pasca bencana, TAGANA turut membantu pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKARMAT) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk *assessment* kebutuhan logistik korban bencana seperti bencana kebakaran, pohon tumbang, atap roboh, dan sebagainya.

Dengan kondisi bencana yang tidak dapat diprediksi, personil TAGANA dituntut harus siaga setiap saat jika sewaktu-waktu diperlukan baik tenaga, pikiran dan waktunya. Pun dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan kebencanaan, banyak giat yang perlu diikuti oleh TAGANA. Sayangnya, karena keanggotaan TAGANA juga bersifat kesukarelawanan, masih sering dijumpai anggota TAGANA yang tidak dapat hadir pada giat-giat TAGANA dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, atau dengan kata lain sedang bekerja mencari nafkah. Pihak Dinas Sosial selaku Pembina TAGANA di tingkat kabupaten/kota pun tidak bisa serta merta menuntut TAGANA untuk selalu tanggap jika ada kegiatan yang melibatkan TAGANA, mengingat banyak anggota TAGANA yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik purposive sampling dalam menentukan sumber data, informan yang dipilih adalah orang yang mengetahui permasalahan sehingga data yang diperoleh akan menghasilkan data yang akurat.

Dua sumber data penelitian ini yaitu data primer, data yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang sudah terlibat dalam organisasi TAGANA dalam jangka waktu yang lama dan terlibat aktif di setiap kegiatan organisasi TAGANA. Kemudian data sekunder, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berita, artikel, buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal tentang Tagana serta dokumen anggota organisasi, Permensos tentang TAGANA, Buku saku TAGANA, sebagai data pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah sukarelawan plat merah di bidang kebencanaan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sejak Maret 2004. Karena bernaung di bawah bendera Kemensos, TAGANA eksis hampir di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan menjadi mitra Dinas Sosial setempat. TAGANA mengajak masyarakat untuk memahami kemampuan diri dan lingkungan mengenai kerawanan bencana, mengadakan sosialisasi untuk melestarikan, menjaga lingkungan hidup serta memberikan pemahaman mengenai bahaya, dan siklus bencana yang dapat terjadi.



Gambar 1. Sejarah TAGANA

Sumber: @kemensosri

Kegiatan TAGANA terkategori dalam tiga fase yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada saat pra bencana TAGANA melakukan pemetaan daerah rawan bencana, membentuk kampung siaga bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya pada saat bencana tugas TAGANA yakni, melaksanakan evakuasi penyelamatan korban, pendataan terhadap korban bencana, melakukan operasi pada bidang yang dijalankan seperti dapur umum, logistik, serta pendampingan psikososial, melakukan mobilisasi dan tanggap darurat lainnya. Pada pasca bencana TAGANA masih dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, yakni mendata kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut, melakukan pemulihan sosial dan pendampingan advokasi sosial.

Pada Kota Yogyakarta angkatan pertama TAGANA berdiri tahun 2006, dengan jumlah anggota 59 orang di tahun 2024 yang tersebar di 14 kemantren/kecamatan. Dengan syarat calon anggota TAGANA merupakan warga negara Indonesia, berusia 18 tahun sampai 45 tahun, sehat jasmani dan rohani.

Dalam melakukan kegiatannya TAGANA memiliki beberapa prinsip, salah satu yang terpenting yakni prinsip nilai kemanusiaan yang merupakan roh sekaligus landasan dalam organisasi ini. Masing-masing anggota tidak memiliki jenjang karir tetapi tetap bertahan atas dasar rasa kemanusiaan.

Dalam Permensos No 29 tahun 2012 disebutkan bahwa Tagana merupakan organisasi sukarelawan yang berasal dari masyarakat, di bawah pembinaan Dinas Sosial. Pendanaan terhadap Tagana sangat tergantung pada anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dan sumbangan masyarakat. Insentif yang diberikan kepada anggota Tagana dapat dikelompokkan dalam dua insentif. Pertama, insentif yang diberikan dalam kondisi normal (ketika tidak ada aktivitas dalam penanggulangan kegiatan). Insentif tersebut diberikan perbulan kepada anggota yang terdaftar sebagai anggota aktif. Kedua, insentif yang diberikan kepada anggota Tagana selama mereka melakukan aktivitas penanggulangan bencana (dana pengalangan Tagana) berasal dari Pusat (Kementrian Sosial) adalah sebesar Rp.100.000, per orang/hari. Sedangkan dana yang berasal dari daerah ditentukan sesuai dengan kemampuan masing masing daerah. Meskipun TAGANA adalah sukarelawan yang bekerja dan bertindak tanpa mengharapkan pamrih berupa materi, dengan tingginya resiko tugas yang dihadapi dan besarnya beban tugas

yang ada pada sukarelawan Taruna Siaga Bencana sudah sepatutnya mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak. Realitas yang terjadi di lapangan, banyak anggota TAGANA yang harus membagi waktu antara melakukan pekerjaan utama dengan melakukan kerja-kerja kemanusiaan.

Untuk TAGANA Kota Yogyakarta, tali asih dirasa kurang membantu meningkatkan kesejahteraan. Selain nominalnya yang tidak seberapa, yaitu sebesar 250 ribu per bulan, waktu pencairannya pun tidak rutin, melainkan dirapel beberapa bulan, sesuka hati Kemensos. Atas dasar realitas yang terjadi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta) secara khusus menganggarkan rekening TAGANA untuk belanja operasional kebencanaan. Anggaran tersebut di tahun 2024 ini senilai Rp 415.320.650,00 untuk alokasi seperti : (1) Honor Piket posko/markas; (2) Uang Operasional Kebencanaan Dalam Kota; (3) Honor panitia dan instruktur, (4) Makan Minum Rapat, dsb. Harapannya dengan adanya dukungan anggaran dari dinas, TAGANA menjadi lebih semangat dan kompak dalam melaksanakan ketugasannya sebagai sukarelawan bencana yang tanggap sigap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Berbicara kesejahteraan tentu tidak hanya melulu membahas terkait uang saja. Berdasarkan sumber literatur dan wawancara yang penulis dapatkan, mayoritas TAGANA dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh instansi dinas sosial Kabupaten maupun Provinsi. Hal tersebut tentu mengagetkan, padahal ketugasan TAGANA ini memiliki risiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengancam keselamatan diri sendiri. Karena tidak adanya jaminan tersebut sehingga sukarelawan bekerja dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kecelakaan kerja selama menjadi sukarelawan penanggulangan bencana.

Beruntung, pada pertengahan tahun 2021 yang lalu sebanyak 50 anggota TAGANA Kota Yogyakarta mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di mana angsuran kepesertaannya berasal dari bantuan beberapa perusahaan. Meskipun hanya mengcover selama 6 bulan, bantuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menunjukkan kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk TAGANA yang banyak membantu berbagai hal terutama dalam penanganan Covid-19, termasuk memasak untuk dapur umum dan pendistribusian logistik.

Untuk pengembangan SDM Tagana Kota Yogyakarta mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang penanganan kebencanaan dari berbagai pihak misalnya dari BPBD dan Badan SAR Nasional (BASARNAS). Dari internal Dinas Sosial Kota Yogyakarta, pernah menyelenggarakan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan satu tahun dua kali, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Dinas Sosial DIY, Pelopor Perdamaian, Kampung Siaga Bencana, dan sebagainya. Peningkatan kapasitas yang diselenggarakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan SDM Tagana.

Tagana sebagai sebuah organisasi tentunya membutuhkan markas atau posko sebagai pusat kegiatan. Pada umumnya posko kesiapsiagaan yang difasilitasi baru sampai di tingkat Kabupaten/Kota belum sampai pada kecamatan. Untuk Tagana Kota Yogyakarta sendiri telah mendapat tempat (ruang) yang dipergunakan sebagai Posko kegiatan, yaitu di pojok area kompleks Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (RPSLUT) Budhi Dharma, dengan alamat Jl. Ponggalan, UH VII/203 Giwangan Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

TAGANA Kota Yogyakarta dalam menjalankan Permensos TAGANA, tetap memegang teguh prinsip kemanusiaan. Kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain membantu pemerintah memasak untuk dapur umum terutama saat Covid-19, pengelolaan hunian shelter isolasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk upaya Pengurangan Risiko Bencana (Tagana Masuk Sekolah), *assessment* kejadian bencana seperti kebakaran, pohon tumbang, talud ambrol, atap roboh, pengelolaan gudang *bufferstock* bencana, dan lain-lain. Meskipun dukungan dari Kemensos sebagai pendiri TAGANA masih banyak kekurangan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencoba memfasilitasi kegiatan TAGANA dengan dukungan anggaran dan jaminan sosial.

Berdasarkan analisis penulis, anggota TAGANA Kota Yogyakarta yang bekerja mayoritas tidak banyak berkegiatan di organisasi TAGANA karena memang keterbatasan waktu. Mereka memilih untuk melakukan pekerjaan utama dibanding mengikuti giat TAGANA. Sementara itu untuk anggota TAGANA yang fleksibel dan berkomitmen pada tanggungjawab lebih banyak aktif dan terlibat dalam kegiatan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa TAGANA Kota Yogyakarta masih mampu melaksanakan kegiatan TAGANA karena jiwa kemanusiaan yang dimiliki para anggotanya. Namun dari segi kesejahteraan, mereka tidak bisa menjadikan TAGANA sebagai wadah penghasil materi. Sebab memang roh dari lahirnya TAGANA adalah kemanusiaan, bukan keuangan.

B. Saran

1. Dinas Sosial serta instansi pusat yaitu Kemensos harus melakukan upaya konkrit dalam pembinaan TAGANA agar semangat juang mereka kembali seperti saat mereka dulu mendaftar menjadi anggota TAGANA. Baik dari sisi anggaran dan juga perhatian pemerintah harus memprioritaskan terkait penanganan dan mitigasi bencana, sebab bencana tidak dapat diprediksi, dan TAGANA adalah salah satu garda terdepan dalam bidang kebencanaan yang dituntut untuk selalu sigap siap siaga setiap saat. Kesejahteraan para TAGANA juga perlu ditingkatkan agar kualitas hidup mereka layak.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait regenerasi anggota TAGANA, sebab selama ini keanggotaan TAGANA adalah seumur hidup dan proses kaderisasi sangat minim. Setiap tahunnya, untuk menjadi anggota TAGANA hanya melalui proses verifikasi ulang, hampir tidak pernah ada rekrutmen anggota baru.
3. Masing-masing anggota TAGANA perlu menanamkan mindset bahwa kerja-kerja kemanusiaan tidak memberikan manfaat secara materi tetapi kepuasan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, N.M., Hermanto, B. (2023). QUO VADIS KEBIJAKAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENORMAAN LEMBAGA PENGAWAS. *Jurnal Literasi Hukum*, 7(01), <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7522>
- Assidiqi, A., & Amin, S. . (2022). FAKTOR PENYEBAB LOYALITAS TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 833-844. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.18158>
- Firrizqi, M., Arif, L. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 5(02), 144-153. <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i2.10929>
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/05/08/510/1071155/350-relawan-dan-tagana-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-program-gandeng-gendong>
- Irtanto. (2022). Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(2), 105– 123.
- Peraturan Menteri Sosial RI. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana. In Menteri Sosial Republik Indonesia. <http://www.bphn.go.id/Data/Documents/14pmsos008.Pdf>
- Peraturan Menteri Sosial RI. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Tagana. Menteri Sosial Republik Indonesia, 2008, 1–13